

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA DAERAH PEMEKARAN DI PROVINSI JAMBI**



**Disusun Oleh :**

**AMELIA AGUSTIN**

**1700860201023**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**

**2022**

## TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini komisi pembimbing skripsi dan ketua program studi pembangunan menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : AMELIA AGUSTIN

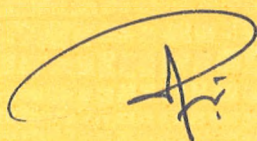
Nim : 1700860201023

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA DAERAH PEMEKARAN DI PROVINSI JAMBI

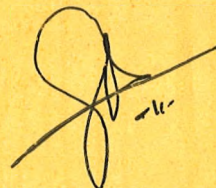
Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diuji pada ujian skripsi dan komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Pembimbing Skripsi I



Dr. M. Zahari MS, SE, M.Si

Pembimbing Skripsi II



M. Syukri, SE, Sy. M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan




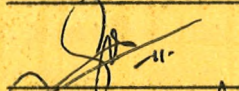
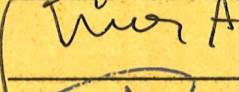
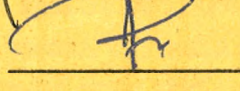
Hj. Susilawati, SE, M.Si

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini dipertahankan Tim Penguji ujian komprehensif dan ujian skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 04 Februari 2022  
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

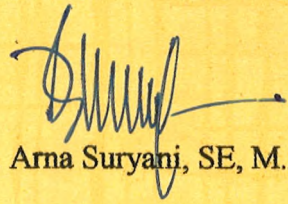
### PANITIA PENGUJI

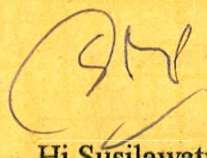
JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	: Dr.Evi Adriani,SE, M.Si	
Sekretaris	: M.Syukri,SE,Sy.M.Si	
Penguji Utama	: M.Alhudori, SE, MM	
Anggota	: Dr.M.Zahari MS,SE,M.Si	

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

  
Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak,CA,CMA

  
Hj. Susilawati, SE, MSi

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMELIA AGUSTIN

Nim : 1700860201023

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Dosen Pembimbing : Dr. M. Zahari MS, SE, M.Si dan M. Syukri, SE, Sy. M.Si

Judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA DAERAH PEMEKARAN DI PROVINSI JAMBI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, skripsi ini adalah karya orisinil bukan hasil plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karna karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi pembangunan fakultas ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Januari 2022

Membuat Pernyataan

AMELIA AGUSTIN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami hanturkan kepada Sang Penguasa Kehidupan Allah SWT atas segala pertolongan dan anugerahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang penulis harapkan. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam penulis tunjukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dan tokoh inspirasi yang membawa islam sebagai agama yang sempurna dan menuntun kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini benar-benar menjadi sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat semua pihak.

Kemudian penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, terutama kepada Orang tua saya yaitu ayah saya BAHARUDIN dan ibu saya AGUSTIMAR yang telah memberikan doa, kasih sayang, materi, semangat, serta ceramahan yang bermanfaat. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.AK, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari.
3. Ibu Hj. Susilawati, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj. Hasminidiarty, SE, M.Si selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Drs. M. Zahari MS, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
6. Bapak M. Syukri, SE, Sy. ME selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.

7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari atas segala arahan, wawasan, serta pengetahuan yang telah diberikan dengan setulus hati.
8. Seluruh keluarga Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Seluruh keluarga KKN Posko Desa Suka Damai yang selalu memberikan canda dan tawa selama kita KKN dan membantu memberikan dukungan dan doanya.
10. Seluruh teman-teman saya yaitu susi, nisya, risky, imah, desi, elda, namira gita, regita, dan adik-adik saya yaitu Mila dan Rosi.

Penulis hanya dapat memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, semoga jasa-jasa tersebut menjadi amal yang sholeh bagi mereka semua, dan mendapat ridho dari Allah SWT, serta mendapat balasan yang setimpal dihari kemudian nanti, Amiin ya rabbal'alam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis terima kritikan-kritikan dan saran-saran yang membangun dari para pembaca, demi kajian ilmiah yang lebih baik lagi bagi penulis untuk masa-masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2022

Penulis

**Amelia Agustin**

## ABSTRACT

**( AMELIA AGUSTIN / 1700860201023 / The Influence of Local Revenue, General Allocation Funds, and Profit Sharing Funds on Capital Expenditures in Expansion Regions in Jambi Province / Supervisor I Dr. M. Zahari MS, SE, M.Si Supervisor II M. Syukri, SE Sy, M.Si)**

Capital Expenditure is the APBD Expenditure budget used for expenditures made in the context of purchasing/procuring or developing tangible fixed assets that have a useful value of more than 12 (twelve) months to be used in government activities such as in the form of land, equipment and machinery, buildings and buildings, roads, irrigation and networks and other fixed assets to improve pre-facility services for the welfare of the community. This study aims to determine how much influence the regional original income, general allocation funds, and profit-sharing funds have in increasing capital expenditures in the expansion area of Jambi province.

Based on the results of the research conducted, the variables simultaneously have the effect of regional original income, general allocation funds, and profit sharing funds that affect capital expenditures. Partially, the regional original income variable does not have a significant effect on capital expenditures, then general allocation funds have a significant effect on capital expenditures, while profit-sharing funds do not have a significant effect on capital expenditures.

Keywords: APBD, PAD, DAU, DAK, Capital Expenditure

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Peneli .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	18
1.3 Rumusan Mas .....	23
1.4 Tujuan Penelit .....	23
1.5 Manfaat Penel .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN</b>	
2.1 Landasan Teori.....	25
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	25
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	29
2.1.4 Dana Bagi Hasil .....	30
2.1.5 Belanja Modal.....	32
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	37
2.3 Penelitian Terdahulu.....	39
2.4 Kerangka Pemikiran .....	41
2.5 Hipotesis .....	42



2.6 Metodologi Penelitian .....	42
2.5.1 Jenis dan sumber data .....	41
2.5.2 Metode pengumpulan data.....	42
2.5.3 Alat analisis .....	43
2.7 Operasional Variabel .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	
3.1 Letak Geografis Daerah Pemekaran .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	63
4.2 Pembahasan .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralis, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari pemerintah pusat itu disebut otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat (Bastian 2010).

Otonomi daerah diresmikan yang diperlukan per 1 Januari 2001 mengharuskan masing-masing daerah mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah berisi hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2009).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih. Pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dijelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kabupaten dapat dimekarkan menjadi dua kabupaten atau lebih. Syarat tersebut yaitu kelayakan administratif, kelayakan fisik kewilayahan dan kelayakan teknis. Apabila indikator yang harus terpenuhi yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana prasarana.

Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah yang mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal. Sebagai perwujudan daerah pemekaran yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Purnamawati, 2006).

Daerah pemekaran dituntut untuk mampu merintis dan mengembangkan kemampuan untuk membangun dengan melakukan langkah-langkah terobosan.

Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah untuk mendanai dan mengelolah keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan daeri daerah induk dan provinsi, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah induk dan provinsi.

Provinsi jambi merupakan provinsi yang wilayah kabupaten/kota-nya mengalami pemekaran. Secara administrasi, saat ini diprovinsi jambi terdapat sembilan kabupaten dua kota. Salah satu yang menjadi alasan pemekaran kabupaten/kota tersebut adalah karena pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pemerintahan sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah pemekaran.

Dibentuknya daerah pemekaran memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu pembiayaan yang disebut dengan belanja daerah. Untuk membiayai belanja daerah, sumber dana utama Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dikarenakan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah, maka kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana transfer (dalam penelitian ini dana transfer yang dimaksud adalah dana perimbangan) yang terdiri Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintahan atau instansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak

hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi ada kaitanya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut.

Demikian halnya Pendapatan Asli Daerah didaerah pemekaran di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 Tahun belakang. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah daerah pemekaran di Provinsi Jambi :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Pemekaran Di Wilayah**  
**Provinsi Jambi 2015-2020**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (rupiah)	Perkembangan (%)
1	Muaro jambi	2015	63.662.790.891	0,03
		2016	60.630.301.197	-0,04
		2017	77.926.789.369	0,28
		2018	90.305.498.363	0,15
		2019	93.794.601.240	0,03
		2020	92.797.887.531	-0,01
2	Sarolangun	2015	85.372.961.961	0,40
		2016	92.425.177.748	0,08
		2017	85.185.129.614	-0,07
		2018	118.828.593.872	0,39
		2019	94.621.365.980	-0,20
		2020	70.098.806.982	-0,25
3	Tebo	2015	62.037.299.487	0,09
		2016	60.938.006.779	-0,01
		2017	68.406.126.028	0,12
		2018	76.160.028.618	0,11
		2019	83.236.373.472	0,09
		2020	78.459.424.383	-0,05
4	Tanjung Jabung Timur	2015	38.473.606.893	0,10
		2016	43.935.743.484	0,14
		2017	76.775.700.726	0,74
		2018	49.607.102.060	-0,35
		2019	53.919.302.033	0,08
		2020	49.646.511.513	-0,07
5	Kota Sungai Penuh	2015	36.246.931.834	0,09
		2016	36.632.476.994	0,01
		2017	31.420.979.313	-0,14
		2018	34.184.049.669	0,08
		2019	34.900.741.628	0,02
		2020	29.050.525.938	-0,16

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)*

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi daerah Pemekaran setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,03%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -0,04% , tahun 2019 meningkat sebesar 0,01%, tahun 2020 kabupaten Muaro Bungo menurun lagi sebesar 0,01%. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,04%, tahun 2017 Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan sebesar -0,07%, ditahun 2018 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,39%, pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar -0,25%. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tebo tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar -0,09, sedangkan ditahun 2016-2018 mengalami penurunan sebesar -0,11%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,09%, ditahun 2020 kabupaten Tebo menurun drastis sebesar-0,57%. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjng Jabung Timur ditahun 2015-2017 mengalami peningkatan 0,74%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar -0,35%, ditahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,08%, sedangkan ditahun 2020 kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis sebesar -0,07%. Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,01%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,14%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02%, sedangkan ditahun 2020 Kota Sungai Penuh menurun drastis sebesar -0,16%.

Melalui pendapatan asli daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Setiap daerah



mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dan karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini dan fenomena yang diangkat pada penelitian ini, yaitu kurangnya perhatian dari sebagian besar provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih redah. Pada penelitian ini tidak mencantumkan dana alokasi khusus karena pemanfaatan dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun

2004). Dana Alokasi umum (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat keada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi tranfer yang cukup signifikan didalam APBD dari pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Demikian halnya Dana Alokasi Umum Daerah Pemekaran Wilayah di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dapat dilihat dalam tabel 1.2 :

**Tabel 1.2**  
**Pengalokasian Dana Alokasi Umum Di Daerah Pemekaran Wilayah Provinsi**  
**Jambi tahun 2015-2020**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Dana Alokasi Umum (rupiah)	Perkembangan (%)
1	Muaro jambi	2015	572.622.988.000	0,01
		2016	681.514.000.000	0,19
		2017	670.341.091.000	-0,01
		2018	670.341.091.000	0,00
		2019	699.024.250.000	0,04
		2020	412.574.295.000	-0,41
2	Sarolangun	2015	517.687.718.000	0,00
		2016	587.491.000.000	0,13
		2017	583.152.378.000	-0,00
		2018	583.152.387.000	0,00
		2019	599.555.685.000	0,02
		2020	536.952.715.000	-0,10
3	Tebo	2015	507.153.153.000	-0,00
		2016	586.980.000.000	0,15
		2017	582.313.417.000	-0,00
		2018	582.313.417.000	0,00
		2019	598.297.279.000	0,02
		2020	534.449.531.000	-0,10
4	Tanjung Jabung Timur	2015	432.097.281.000	-0,05
		2016	533.830.000.000	0,23
		2017	533.204.953.000	-0,00
		2018	540.400.531.000	0,01
		2019	564.422.212.000	0,04
		2020	521.920.298.000	-0,07
5	Kota Sungai Penuh	2015	370.113.129.000	0,01
		2016	425.687.000.000	0,15
		2017	419.516.054.000	-0,01
		2018	422.532.652.000	0,00
		2019	447.899.516.000	0,06
		2020	412.574.295.000	-0,07

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)*

Berdasarkan tabel 1.2 Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) di daerah pemekaran provinsi Jambi dalam lima (5) tahun belakang mengalami fluktuasi, yaitu Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 0,19%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,01%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,04%, sedangkan ditahun 2020 kabupaten Muaro Jambi menurun kembali sebesar -0,41%. Dana Alokasi Umum kabupaten Sarolangun tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,13%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,00%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02%, sedangkan ditahun 2020 Dana Alokasi Umum Kabupaten Sarolangun menurun drastis sebesar -0,10%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Tebo ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,00%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,15%, ditahun 2017 menurun kembali sebesar -0,00%, sedangkan ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02%, ditahun 2020 kabupaten Tebo menurun drastis sebesar -0,10%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,05%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,25%, ditahun 2017 kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan kembali sebesar -0,00%, sedangkan ditahun 2018 -2019 mengalami peningkatan sebesar 0,04%, ditahun 2020 kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis sebesar -0,07%. Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,15%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan

sebesar -0,01%, ditahun 2018-2019 Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 menurun drastis sebesar -0,07%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Demikian halnya Dana Bagi Hasil Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Bagi Hasil dapat dilihat dalam tabel 1.3 :

**Tabel 1.3**  
**Pengalokasian Dana Bagi Hasil Di Daerah Pemekaran Wilayah Provinsi**  
**Jambi tahun 2015-2020**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Dana Bagi Hasil (rupiah)	Perkeembangan (%)
1	Muaro jambi	2015	138.983.691.225	-0,23
		2016	145.857.000.000	0,04
		2017	130.613.404.872	-0,10
		2018	132.951.564.719	0,01
		2019	162.860.483.344	0,22
		2020	106.661.841.353	-0,34
2	Sarolangun	2015	113.475.293.919	-0,30
		2016	117.069.000.000	0,03
		2017	110.575.317.690	-0,05
		2018	121.162.218.738	0,09
		2019	162.425.595.516	0,34
		2020	104.136.093.147	-0,35
3	Tebo	2015	98.567.843.457	-0,30
		2016	99.486.243.324	0,00
		2017	69.647.633.869	-0,30
		2018	93.604.427.213	0,34
		2019	88.859.361.052	-0,05
		2020	82.100.567.834	-0,07
4	Tanjung Jabung Timur	2015	191.245.874.933	-0,38
		2016	169.195.000.000	-0,11
		2017	192.017.565.563	0,13
		2018	1.681.655.423.161	7,75
		2019	207.960.691.035	-0,87
		2020	143.344.109.224	-0,31
5	Kota Sungai Penuh	2015	41.926.783.970	-0,41
		2016	45.658.264.699	0,08
		2017	51.424.947.375	0,12
		2018	56.720.758.242	0,10
		2019	56.308.919.344	-0,00
		2020	67.350.127.277	0,19

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)*

Berdasarkan tabel 1.3 Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah pemekaran wilayah Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, yaitu Dana Bagi Hasil

Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,23%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,04%, ditahun 2017 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan kembali sebesar -0,10%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,22%, sedangkan ditahun 2020 Kabupaten Muaro Jambi menurun drastis sebesar -0,34%. Dana Bagi Hasil Kabupaten Sarolangun tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,30%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,03%, ditahun 2017 Dana Bagi Hasil Kabupaten Sarolangun sebesar-0,05%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,34%, sedangkan ditahun 2020 Dana Bagi Hasil Kabupaten Sarolangun menurun drastis sebesar -0,35%. Dana Bagi Hasil Kabupaten Tebo tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,31%, sedangkan ditahun 2016 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,00%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar -0,30%, ditahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,34%, sedangkan ditahun 2019-2020 Dana Bagi Hasil Kabupaten Tebo menurun drastis sebesar -0,07%. Dana Bagi Hasil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar -0,11%, sedangkan ditahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 7,75%, ditahun 2019-2020 Dana Bagi Hasil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis sebesar -31%. Dana Bagi Hasil Kota Sungai Penuh tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,41%, sedangkan ditahun 2016-2018 mengalami peningkatan sebesar 0,10%, ditahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar -0,00%, ditahun 2020 Dana Bagi Hasil Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan kembali sebesar 0,19%.

Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011).

Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Demikian halnya Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Belanja Modal daerah pemekaran di Provinsi Jambi dapat dilihat dalam tabel 1.4 :



**Tabel 1.4**  
**Pengalokasian Belanja Modal Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi 2015-2020**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Belanja Modal (rupiah)	Perkembangan (%)
1	Muaro Jambi	2015	302.531.328.269	-0,10
		2016	268.531.000.000	-0,11
		2017	368.236.687.926	0,37
		2018	292.728.025.310	-0,20
		2019	332.194.053.216	0,13
		2020	262.778.498.437	-0,20
2	Sarolangun	2015	284.426.210.538	0,24
		2016	233.985.000.000	-0,17
		2017	247.349.222.340	0,05
		2018	215.169.006.764	-0,13
		2019	414.970.363.981	0,92
		2020	247.728.875.511	-0,40
3	Tebo	2015	245.745.363.137	-0,31
		2016	233.970.000.000	-0,04
		2017	233.688.059.239	-0,00
		2018	258.990.826.317	0,10
		2019	269.003.691.375	0,03
		2020	139.855.988.043	-0,48
4	Tanjung Jabung Timur	2015	279.110.877.714	-0,17
		2016	365.778.000.000	0,31
		2017	275.104.187.921	-0,24
		2018	312.956.653.764	0,13
		2019	328.872.997.320	0,05
		2020	229.225.479.693	-0,30
5	Kota Sungai Penuh	2015	177.939.732.342	0,12
		2016	212.005.000.000	0,19
		2017	173.331.166.028	-0,18
		2018	194.683.207.114	0,12
		2019	176.535.574.208	-0,09
		2020	134.644.309.515	-0,23

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)*

Berdasarkan tabel 1.4 Pengalokasian Belanja Modal di daerah pemekaran di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, yaitu Belanja Modal

Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar -0,11%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,37%, ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar -0,20%, sedangkan ditahun 2019 Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan, ditahun 2020 Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi menurun drastis sebesar -0,20%. Belanja Modal Kabupaten Sarolangun tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,24%, sedangkan ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar -0,17% ditahun 2017 Belanja Modal Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan sebesar 0,05%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar -0,13% ditahun 2019 mengalami peningkatann kembali sebesar 0,92%, sedangkan ditahun 2020 Belanja Modal kabupaten Sarolangun menurun drastis sebesar -0,40%. Belanja Modal Kabupaten Tebo tahun 2015-2017 mengalami penurunan sebesar -0,24%, sedangkan ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03%, ditahun 2020 Belanja Modal Kabupaten Tebo menurun drastis sebesar -0,48%. Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,17%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,31%, ditahun 2017 mengalami penurunan lagi sebesar -0,24%, ditahun 2018-2019 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sebesar 0,05%, sedangkan ditahun 2020 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis sebebesar -0,30%. Belanja Modal Kota Sungai Penuh tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,19%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurun sebesar -0,18%, ditahun 2018 Belanja Modal

Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sebesar 0,12%, sedangkan ditahun 2019-2020 Belanja Modal Kota Sungai Penuh menurun drastis sebesar -0,23%.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini bahwa Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada :

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 mengalami ppeningkatan sebesar 0,03%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -0,04% , tahun 2019 meningkat sebesar 0,01%, tahun 2020 kabupaten Muaro Bungo menurun lagi sebesar 0,01%. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,04%, tahun 2017 Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan sebesar -0,07%, ditahun 2018 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,39%, pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar -0,25%. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tebo tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar -0,09, sedangkan ditahun 2016-2018 mengalami penurunan sebesar -0,11%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,09%, ditahun 2020 kabupaten Tebo menurun drastis sebesar-0,57%. Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Tanjng Jabung Timur ditahun 2015-2017 mengalami peningkatan 0,74%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar -0,35%, ditahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,08%, sedangkan ditahun 2020 kabupaten Tanjng Jabung Timur menurun drastis sebesar -0,07%. Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,01%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,14%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02%, sedangkan ditahun 2020 Kota Sungai Penuh menurun drastis sebesar -0,16%.

2. Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 0,19%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,01%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,04%, sedangkan ditahun 2020 kabupaten Muaro Jambi menurun kembali sebesar -0,41%. Dana Alokasi Umum kabupaten Sarolangun tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,13%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,00%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02%, sedangkan ditahun 2020 Dana Alokasi Umum Kabupaten Sarolangun menurun drastis sebesar -0,10%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Tebo ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,00%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,15%, ditahun 2017 menurun kembali sebesar -0,00%, sedangkan ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02%, ditahun 2020 kabupaten Tebo menurun drastis

sebesar -0,10%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,05%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,25%, ditahun 2017 kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan kembali sebesar -0,00%, sedangkan ditahun 2018 -2019 mengalami peningkatan sebesar 0,04%, ditahun 2020 kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis sebesar -0,07%. Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,15%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,01%, ditahun 2018-2019 Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 menurun drastis sebesar -0,07%.

3. Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,23%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,04%, ditahun 2017 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan kembali sebesar -0,10%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,22%, sedangkan ditahun 2020 Kabupaten Muaro Jambi menurun drastis sebesar -0,34%. Dana Bagi Hasil Kabupaten Sarolangun tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,30%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,03%, ditahun 2017 Dana Bagi Hasil Kabupaten Sarolangun sebesar -0,05%, ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,34%, sedangkan ditahun 2020 Dana Bagi Hasil Kabupaten Sarolangun menurun drastis sebesar -0,35%. Dana Bagi Hasil Kabupaten Tebo tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,31%, sedangkan ditahun 2016

mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,00%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar -0,30%, ditahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,34%, sedangkan ditahun 2019-2020 Dana Bagi Hasil Kabupaten Tebo menurun drastis sebesar -0,07%. Dana Bagi Hasil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar -0,11%, sedangkan ditahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 7,75%, ditahun 2019-2020 Dana Bagi Hasil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drstis sebesar -31%. Dana Bagi Hasil Kota Sungai Penuh tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,41%, sedangkan ditahun 2016-2018 mengalami peningkatan sebesar 0,10%, ditahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar -0,00%, ditahu 2020 Dana Bagi Hasil Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan kembali sebesar 0,19%.

4. Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar -0,11%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,37%, ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar -0,20%, sedangkan ditahun 2019 Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan, ditahun 2020 Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi menurun drastis sebesar -0,20%. Belanja Modal Kabupaten Sarolangun tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,24%, sedangkan ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar -0,17% ditahun 2017 Belanja Modal Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan sebesar 0,05%, sedangka ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar -0,13% ditahun 2019 mengalami peningkatann kembali sebesar 0,92%, sedangkan

ditahun 2020 Belanja Modal kabupaten Sarolangun menurun drastis sebesar -0,40%. Belanja Modal Kabupaten Tebo tahun 2015-2017 mengalami penurunan sebesar -0,24%, sedangkan ditahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03%, ditahun 2020 Belanja Modal Kabupaten Tebo menurun drastis sebesar -0,48%. Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,17%, sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,31%, ditahun 2017 mengalami penurunan lagi sebesar -0,24%, ditahun 2018-2019 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sebesar 0,05%, sedangkan ditahun 2020 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis sebesar -0,30%. Belanja Modal Kota Sungai Penuh tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,19%, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,18%, ditahun 2018 Belanja Modal Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sebesar 0,12%, sedangkan ditahun 2019-2020 Belanja Modal Kota Sungai Penuh menurun drastis sebesar -0,23%.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal di daerah Pemekaran di provinsi Jambi ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal di daerah Pemekaran di Provinsi Jambi ?

### **1.4 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal di daerah Pemekaran di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal di daerah Pemekaran di Provinsi Jambi.



## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

### 1. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori tentang Belanja Modal

### 2. Manfaat Akademis

- Bagi penelitian dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lapangan.
- Bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan penelitian yang sama.

### 3. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan berfikir dalam bidang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan belanja modal.

### 4. Bagi Masyarakat

Untuk memperluas wawasan masyarakat dalam pengalokasian dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja modal.

### 5. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi positif dalam rangka menunjang pendapatan daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah”. Sedangkan menurut Widjajanta, Widyaningsih & Tanuatmodjo (2014 : 20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah..

Seragih (2005: 127) menyatakan, APBD merupakan Suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain itu menurut Mahsu (2013 : 145) menyatakan bahwa Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Dien, Tinango & Stanley (2015), Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret.

Unsur-unsur APBD Menurut Harlim (2007: 15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang merupakan batass maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Yani (2008:44), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas

pemerintahan dan program-program pemerintahan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut :

### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2008 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2. Retribusi daerah**

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU Pajak dan Retribusi Daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD kedua di Provinsi Jambi setelah Pajak Daerah. Berdasarkan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi ke dalam tiga golongan :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha;
- c. Retribusi perizinan terpadu.

Jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklarifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

##### **2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut peraturan pemerintah No.104 tahun 2000 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragi (2003: 104) bagi daerah yang relatif mini sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2002: 142). Jadi DAU merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelolah segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelolah keuangan daerah sehingga potensi daerah akan terus berkembang.

#### **2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:42), banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sidik et.al (2004:95) mengatakan, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 44) menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi

daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari: 1) kehutanan; 2) pertambangan umum; 3) perikanan; 4) pertambangan gas bumi; dan 5) pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil (*revenue sharing*) belum menyentuh seluruh sumber-sumber daya potensial yang diperoleh dari daerah kabupaten/kota baik berupa pajak, antara lain; PPN, PPh Pasal 25/29 Badan, dan jenis pajak lainnya, maupun dari sumber daya alam, yang secara umum masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada APBN. Dalam hal yang sama, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menegaskan, salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sampai saat ini secara formal dimiliki sepenuhnya oleh pusat. Dalam jangka panjang, diharapkan ada pembagian jenis PPN yang dimiliki pusat dan yang dimiliki daerah. Pembagian wewenang ini tentunya mempertimbangkan jenis komoditi/jasa yang dipungut PPN-nya, pada tingkat pemerintahan mana pengelolaan ini akan optimal dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya jika ada.



### **2.1.5 Belanja Modal**

Mahsun (2011: 95) menjelaskan belanja daerah adalah sebagai berikut: “Belanja Daerah merupakan semua Pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Belanja Modal adalah anggaran Pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengandaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut Darise (2008 : 141), mengemukakan bahwa belanja modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengandaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pasal 52 adalah belanja barang atau jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengandaan barang dan jasa yang nilai

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Klasifikasi Belanja daerah yang dikemukakan oleh Halim (2004: 18) sesuai dengan klasifikasi belanja daerah menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002.

1. Belanja Administrasi Umum
  - a. Belanja Pegawai/Personalia
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Pemeliharaan
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal
4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
5. Belanja Tidak Tersangka

Menurut Halim (2004: 4-5) Belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian asset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan asset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah

daerah. Untuk menambahkan asset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD.

Menurut Abdul Halim (2004: 113-114) Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kuantitas asset.

Kriteria Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Sedangkan menurut Yusuf (2010: 22) menyatakan “Tanah merupakan asset pemerintah yang sangat vital dalam operasional dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Asset tanah merupakan asset yang paling sulit dalam pengelolannya”. Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengandaan, pembelian, pembebasan penyelesaian baik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah

dan sampai tanah dimaksud siap pakai. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengandaan/ penambahan/ pengertian dan peningkatan, kapasitas peralatan dan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Darwanto (2007:12) yang menyatakan bahwa Pendapata Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan begitu pengeluaran pemerintah lewat belanja modal melalui pembangunan di berbagai sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Menurut M Zahari MS (2018) Potensi Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M Zahari MS (2018) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula.

### **2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Etika yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan

parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Dana alokasi umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya.

### **2.2.3 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Wandira, 2013:49-50) diperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan

sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun literatur-literatur yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

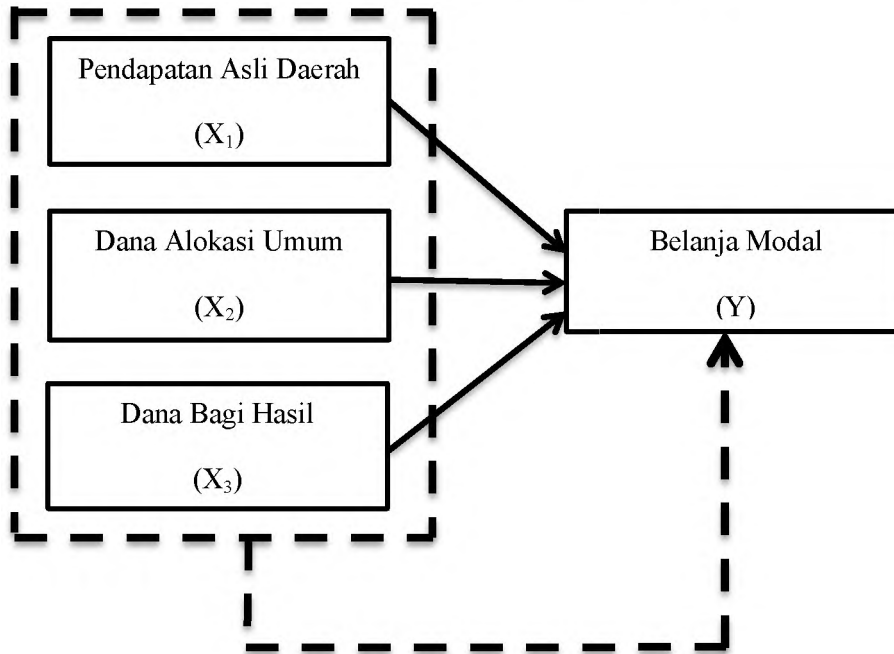
No	Peneliti/tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Rasyid (2019)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah	Variabel yang digunakan adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukan adanya signifikan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah sebesar 9,53%
2.	Arbie Gugus (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidka berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap



				belanja modal.
3.	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Belanja Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap belanja daerah
4.	Venny Tria Vanesha (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal	Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun demikian, secara parsial hanya Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi
5.	Rachmawati Meita Oktaviani (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan. Kerangka pemikiran merupakan miiature riset, maka dari itu penyusunan harus disajikan secara lengkap namun ringkas.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**

Keterangan :

———— = garis hubungan secara parsial

- - - - = garis hubungan secara simultan

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dan harus dibuktikan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota Pemekaran di Provinsi Jambi tahun 2015-2020.

2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota Pemekaran di Provinsi Jambi 2015-2020.

## **2.5 Metode Penelitian**

### **2.6.1 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dalam bentuk data deret berskala (time series) dan *cross section*. Oleh karena itu, data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Winarno, 2011) . Data *Cross section* yaitu data yang dikumpulkan dari satu waktu terhadap banyak subjek dengan daerah penelitian lima (5) Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi jambi, sedangkan data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu kewaktu terhadap suatu OBJEK dari tahun 2015-2020.

#### **b. Sumber Data**

Data ini diperoleh dari Kantor Kementreian Keuangan, WEBSITE Badan Keuangan Daerah (BaKeuDa) Provinsi Jambi, laporan dan buku yang relavan berkaitan dengan penelitian ini.

### **2.7 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi dalam pengumpulan data yang akan diteliti dengan beberapa metode yakni : studi kepustakaan, metode elektronik dan penelitian lapangan. Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan

dengan cara mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti.

### 2.7.1 Metode Analisis

Analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel dan Deskriptif.

- a. Metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel itu sendiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2008).
- b. Metode Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Data Panel adalah kombinasi antaran data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) (Kuncoro, 2011).

### 2.7.2 Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan Adalah regresi data panel dengan tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka untuk melihat sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal daerah pemekaran di Provinsi Jambi.

Disini digunakan regresi linear berganda dengan menggunakan data panel, berikut adalah rumus regresi data panel (Suliyanto, 2011 : 231) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

dimana :

Y : Belanja Modal  
 $\beta_0$  : konstanta  
 $\beta_1\beta_2\beta_3$  : Koefisien Regresi  
 $X_1$  : Pendapatan Asli Daerah  
 $X_2$  : Dana Alokasi Umum  
 $X_3$  : Dana Bagi Hasil  
 $E_{it}$  : *Error*

#### a. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam estimasi model analisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan yang terakhir menggunakan pendekatan *Randomm Effect Model* (Widarjono, 2018 : 365).

##### 1. *Common Effect Model*

Metode pendekatan *common effect model* adalah pendekatan paling sederhana untuk mengestimasi data panel dimana hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan menggabungkan data yang kita punya tanpa melihat perbedaan waktu individu, maka kita bisa menggunakan metode OLS mengestimasi model data panel. *Common effect model* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

##### 2. *Fixed Effect Model*

Didalam *fixed effect model* diasumsikan terdapat efek yang memiliki perbedaan antar individu. Oleh sebab itu, *fixed effect model* merupakan parameter yang tidak diketahuidan selanjutnya akan diestimasi dengan menggunakan teknik

variabel dummy. Didalam *fixed effect model* kita menggunakan variabel dummy sebagai alat untuk mengestimasi data panel yang ingin kita teliti. Model estimasi tersebut adalah *Least Aquares Dummy Variables (LSDV)*. Rumus *fixed effect model* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

### 3. *Random Effect Model*

Didalam *Random Effect Model* ini kita akan mengestimasi data panel yang dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan baik antar waktu maupun antar individu. *Random Effect Model* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

#### **b. Uji kesesuaian Model**

Cara menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel, terdapat tiga pengujian yang dapat dilakukan yakni :

##### 1. Uji Chow

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana diantara kedua metode yakni metode *common effect* dan metode *fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam model data panel (Widarjono, 2009). Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Model } \textit{Common Effect}$$

$$H_1 = \text{Model } \textit{Fixed Effect}$$

$H_0$  ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sebaliknya,  $H_0$  diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang digunakan sebesar 5%.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian ini membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* untuk menentukan model mana yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hipotesis uji hausman sebagai berikut :

$$H_0 = \text{Model Random Effect}$$

$$H_1 = \text{Model Fixed Effect}$$

$H_0$  ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sebaliknya,  $H_0$  diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang digunakan sebesar 5%.

### 2.7.3 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

$R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel independen. Konsep OLS adalah meminimumkan residual, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai  $R^2$  yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel Independen yang dimasukkan kedalam model. Dimana  $0 < R^2 < 1$  sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- Nilai  $R^2$  yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel tidak bebas sangat terbatas.
- Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabe-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel tidak bebas.

Menurut santoso dalam prianto (2013:143) bahwa untuk regresi dengan lebih dari tiga variabel digunakan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinan, oleh karena itu banyak peneliti mengajukan menggunakan *Adjusted R<sup>2</sup>* dalam menganalisis model regresi terbaik (Imam Ghozali, 2005).

#### **2.7.4 Uji Asumsi Klasik**

Dalam melakukan analisis regresi linear berganda dengan metode OLS maka pengujian model terhadap asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik tersebut antara lain sebagai berikut :

##### **1. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah hubungan linear antara variabel independen. Dalam asumsi regresi linear klasik, antar variabel independen tidak diijinkan untuk saling korelasi. Adanya multikolinearitas akan menyebabkan besar varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval kepercayaan terhadap variabel bebas yang digunakan.

##### **2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu merupakan varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarakan dalam spesifikasi model regresi. Dengan kata lain, heteroskedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varian yang konstan.



### **3. Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode lain. Asumsi ini menegaskan bahwa nilai variabel dependen hanya diterangkan (secara sistematis) oleh karena variabel independen dan bukan oleh variabel gangguan (Gujarati, 2006).

Untuk menilai apakah model dalam penelitian terdapat masalah autokorelasi atau tidak maka digunakan pengujian dengan metode Durbin Watson test.

### **4. Uji Normalitas**

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusikan normal atau tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

#### **2.7.5 Uji Statistik**

##### **1. Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2011), dalam penelitian ini uji f digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95 persen dengan ketentuan sebagai berikut : Dengan menggunakan nilai Probabilitas signifikan :

1. Rumusan hipotesis uji F adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y

$H_a$  : terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y

2. Menentukan  $f_{\text{tabel}}$  dan  $f_{\text{hitung}}$

a. jika tingkat signifikan  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima sebaliknya  $H_a$  ditolak.

b. jika tingkat signifikan  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak sebaliknya  $H_a$  diterima.

F tabel didapat dari perhitungan  $df_1 = k - 1$ ,  $DF_2 = n - k$

Keterangan :

k = jumlah responden

n = jumlah variabel

1. responden = 30

2. Taraf signifikansi 5%

3.  $DF_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$

4.  $DF_2 = k - n = 30 - 3 = 27$

5. f tabel = 2,96

3. kriteria keputusan

-  $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, ini berarti terdapat pengaruh simultan oleh variabel X terhadap variabel Y

-  $f_{\text{hitung}} < f_{\text{tabel}}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh variabel X terhadap variabel Y.

## 2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing hubungan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Menggunakan uji t untuk masing-masing

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas. Apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat (Sugiono, 2010 : 223). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel dan t hitung dengan kriteria pengabilan keputusan sebagai berikut :

1. Menentukan formulasi hipotesis

Ho : tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) terhadap dependen (Y).

Ha : ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen (X) terhadap Variabel dependen (Y).

2. Menentukan t tabel dan t hitung

t tabel dengan tingkat signifikan = 0,05

t hitung didapat dari hasil rumus perhitungan computer =  $n - k - 1$ . Jadi didapat perhitungan jadi. Df = (30 - 4 - 1). Dengan demikian, t tabel yang didapat adalah 2,408

Keterangan : n = jumlah responden  
k = jumlah variabel

3. Keputusan

a. apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

b. apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_0$  diterima  $H_a$  tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

## 2.8 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan definisi atau uraian-uraian yang menjelaskan dari suatu variabel-variabel yang akan diteliti dan mencakup indikator-indikator yang ada pada masing-masing variabel dengan adanya uraian tersebut maka peneliti akan lebih mudah mengukur variabel yang ada.

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Pendapatan Asli Daerah (X <sub>1</sub> )	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rupiah
Dana Alokasi Umum (X <sub>2</sub> )	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Rupiah
Dana Bagi Hasil (X <sub>3</sub> )	Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Rupiah
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.	Rupiah

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### 3.1 Letak Geografis Daerah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara  $0^{\circ} 45'$  sampai  $2^{\circ} 45'$  Lintang Selatan dan antara  $101^{\circ} 10'$  sampai  $104^{\circ} 55'$  Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala

Dari letak geografis ini terlihat bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak ditengah-tengah pulau sumatera yang mempunyai hubungan terbuka dengan daerah-daerah lain. Dengan letak geografis itu maka sangat menguntungkan Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri guna mneunjang dan memacu serta mendorong lajunya pembangunan di Provinsi Jambi. Luas Provinsi Jambi sebesar  $53.435 \text{ km}^2$  , yang dimana secara administrative Provinsi Jambi sebelum adanya penekanan terbagi atas 6 daerah tingkat II dengan distribusi wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci :  $4.200 \text{ km}^2$
2. Kabupaten Bungo Tebo :  $13.500 \text{ km}^2$
3. Kabupaten Sarolangun Bangko :  $14.200 \text{ km}^2$

4. Kabupaten Batanghari : 11.130 km<sup>2</sup>
5. Kabupaten Tanjung Jabung : 10.200 km<sup>2</sup>
6. Kabupaten Madya Jambi : 205 km<sup>2</sup>

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Sarolangun Bangko merupakan wilayah kabupaten yang mempunyai luas terbesar yaitu 14.200 km<sup>2</sup>, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Bungo tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjab dan Kabupaten Kerinci serta daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu Kota Jambi dengan luas wilayah 205 km<sup>2</sup> dari total keseluruhan luas Provinsi Jambi.

Sejak 12 Oktober 1999, Provinsi Jambi mengalami pemekaran wilayah yaitu dari 6 Kabupaten/Kota menjadi 10 Kabupaten/Kota. Adapun kabupaten-kabupaten yang mengalami pemekaran tersebut meliputi : Kabupaten Batanghari Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro jambi Ibukota Sengeti, Kabupaten Tanjung Jabung dipecah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ibukota Muara Sabak dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ibukota Kuala Tungkal, Kabupaten Sarolangun Bangko dipecah menjadi Kabupaten Bungo dengan Ibukota Muara Bungo dan Kabupaten Tebo Ibukota Muaro Tebo.

Adapun gambaran kondisi geografis Jambi dan Kabupaten/Kota setelah pemekaran yaitu :

**Tabel 3.1**

**Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi**

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
Kerinci	Sungai penuh	4.200	7.86
Bungo	Muara Bungo	7.160	13.40
Tebo	Muara Tebo	6.340	11.86
Sarolangun	Sarolangun	7.820	14.63
Merangin	Bangko	6.380	11.94
Batang Hari	Muara Bulian	4.983	9.33
Muaro Jambi	Sengeti	6.147	11.50
Tanjab Barat	Kuala Tungkal	4.870	9.11
Tanjab Timur	Muara Sabak	5.330	9.97
Kota Jambi	Jambi	205,38	0.39
Provinsi Jambi		53.435	100.00

*Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021*

Berdasarkan tabel 3.1 dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Jambi yang memberi dampak terhadap penerimaan pajak daerah yang di pengaruhi dengan adanya sistem pemerintahan yang baru memiliki program kerja yang direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari wilayah yang mengalami pemekaran. Hal ini didukung oleh program pemerintah yang bersifat *bottom up* yaitu otonomi daerah, dimana program-program tersebut dilaksanakan otonomi daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dimasyarakat maupun disektor publik.

### **3.2 Kondisi Kependudukan**

Penduduk Provinsi Jambi tahun 2019 berjumlah 3.624.579 jiwa yang terdiri dari 1.848.854 jiwa penduduk laki-laki dan 1.775.725 jiwa penduduk perempuan. Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 604.736 jiwa (BPS, 2020). Besarnya jumlah penduduk di Kota Jambi didorong

oleh peranannya sebagai ibukota Provinsi dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di**  
**Provinsi Jambi Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kerinci	119.196	119.486	238.682
2.	Merangin	199.033	189.895	388.928
3.	Sarolangun	153.659	148.249	301.908
4.	Batanghari	139.178	133.701	272.879
5.	Muaro Jambi	228.998	214.366	443.364
6.	Tanjabtim	112.865	107.120	219.985
7.	Tanjabbar	172.821	161.111	333.932
8.	Tebo	182.614	171.871	354.485
9.	Bungo	191.571	183.199	374.770
10.	Kota Jambi	303.818	300.918	604.736
11.	Kota Sungai Penuh	45.101	45.809	90.910
Provinsi Jambi		1.848.854	1.775.725	3.624.579

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2020*

Berdasarkan tabel 3.2 dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jambi sebanyak 1.848.854 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1.775.725 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kota Jambi sebanyak 604.736 jiwa dan disusul oleh Muaro Jambi sebanyak 443.364 jiwa.

### **3.3 Kondisi Perekonomian**

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan bahkan kemandirian daerah adalah sumber penerimaan pajak provinsi yang berkontribusi



kepada pendapatan asli daerah serta pertumbuhan ekonomi. Yang dimana pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. Searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pendapatan masyarakat. Artinya, semakin besar jumlah pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat dihimpun oleh pihak pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun, maka kecenderungan untuk membayar pajak juga akan semakin rendah. Sejalan dengan proses pembangunan, berbagai kegiatan ekonomi yang baru banyak tumbuh untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan ekonomi yang semakin panjang dan kait mengait. Sumber penerimaan pajak menjadi bagian dari pendapatan asli daerah yang dimana digunakan untuk membangun daerah secara mandiri yang dimana kontribusi pajak provinsi menjadi yang penting. Jika tidak ada kegiatan ekonomi maka para wajib pajak pun tidak bisa membayar pajak tersebut.

### **3.4 Letak Geografis Daerah Pemekaran**

#### **1. Muaro Jambi**

Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km<sup>2</sup>, secara administratif terdiri dari 11 [Kecamatan](#), 150 Desa, 5 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 397.351 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,93 persen per tahun.

Seiring meningkatnya perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat maka akan dibentuk 3 kecamatan baru yang direncanakan aktif operasional pada tahun 2010, yaitu :

- Kecamatan Bahar Utara
- Kecamatan Bahar Selatan
- Kecamatan Taman Rajo

Batas wilayah Kabupaten Muaro Jambi :

- Sebelah Utara : Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung timur
- Sebelah Timur : Tanjung Jabung Timur
- Sebelah Selatan : Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatra Selatan
- Sebelah Barat : Batanghari

#### **2. Sarolangun**

Kabupaten di [Provinsi Jambi](#), [Indonesia](#). Luas wilayahnya 6.174 km<sup>2</sup> dengan populasi 279.532 jiwa (Sensus Penduduk 2020). Kabupaten ini beribukota di [Sarolangun](#). Sarolangun Kelahiran pada tanggal 10 Oktober 1999 yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten [Tebo](#), Kabupaten [Muaro Jambi](#) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya, kabupaten ini bersama-sama dengan [Kabupaten Merangin](#) tergabung dalam [Kabupaten Sarolangun-Bangko](#), kemudian diperkeras dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak antara 01°53'39'' sampai 02°46'02'' Lintang Selatan dan antara 102°03'39'' sampai 103°13'17'' Bujur Timur dan adalah dataran rendah dengan tinggi antara 10 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl), dengan pembagian wilayah dan batas menjadi berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Batang hari

Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Sebelah Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Musi Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan

Luas wilayah administratif Kabupaten Sarolangun mencakup 6.174 Km<sup>2</sup>, terdiri dari Dataran Rendah 5.248 Km<sup>2</sup> (85%) dan dataran tinggi 926 Km<sup>2</sup> (15%). Secara administratif pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri atas 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 109 desa. sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 disktrik, 9 kelurahan dan 149 dusun dengan banyak penduduk pada tahun 2010 sebanyak 246.245 jiwa dengan kepadatan penduduk

40 jiwa/Km<sup>2</sup>, rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sampai 3,32 persen, dan jumlah penduduk sarolangun tahun 2020 berjumlah 279.532 jiwa dengan kepadatan 45 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sarolangun adalah kabupaten yang dilalui oleh jalur Lewat Lintas Sumatera. Karena letaknya yang strategis tersebut, karenanya kabupaten ini dihasilkan menjadi suatu tempat yang dapat diperhitungkan untuk membentangkan area usaha. Perekonomian kabupaten yang mempunyai semboyan sepucuk norma budaya srumpun pseko ini sabagian besar berasal perrtanian dan sumber kekuatan dunia yang berupa minyak bumi, batu bara, dan emas. Serta perhotelan dan restoran.

Kabupaten yang dibelah oleh Sungai Tembesi ini mempunyai kuliner tradisional berupa tempoyak dan asam rebung. Tempoyak yaitu durian yang yang disimpan selama jangka waktu tertentu, atau dengan ucap berlainan tempoyak yaitu durian yang dipermentasikan yang disantap dengan metode dimakan langsung bersama nasi, digulai, atau ditumis terlebih dahulu berdasarkan selera penyantapnya. Meskipun tempoyak banyak terdapat di tempat berlainan -seperti Palembang dan Riau-, namun tempoyak dari Kabupaten sarolangun ini mempunyai rasa yang sangat khas. Begitu pula dengan asam rebung, asam rebung juga adalah makanan yang dipermentasikan yang bersal dari tunas bambu. Metode menyantapnya juga sama dengan tempoyak yaitu setelah dipermentasikan kemudian diolah bersama ikan khas Sungai Tembesi dihasilkan menjadi gulai

yang disantap bersama nasi. Rasanya pun juga sangat khas, yaitu akan terasa hangat di tenggorokan.

Untuk tempat wisata, kabupaten ini memang belum punya tempat wisata yang dapat diandalkan. Namun tidak sewenang-wenang beberapa tmpat yang berpotensi dihasilkan menjadi tmpat wisat di daerah ini. Seperti Sungai Batang Asai, Goa Bukit Bulan, Tebing Dunia Sialang, Mata Cairan Asin, Bukit Garam Candi Ulu Nago, Masjid Kuno, Dam Kutur, dan Arung Jeram di Sungai Batang Asai.

Dari semua site plan objek wisata di atas, baru 4 ditengahnya yang dikembangkan. Disamping itu juga telah diberlakukan beberapa even wisata daerah, ditengahnya Jelajah Goa, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, Balumbo Biduk (Lomba Perahu Tradisional), Lomba Rakit Tradisional dan Lomba Arung Jeram.

### **3. Tebo**

Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 12 Oktober 1999. Pada akhir tahun 2020 kabupaten Tebo memiliki jmlah penduduk sebanyak 335.228 jiwa dengan total kepadatan  $52/\text{km}^2$ , yang daerahnya luas  $6.461 \text{ km}^2$  terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 107 desa. Berikut batas wilayah menjadi :

Sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Sebelah Barat : Kabupaten Bungo dan kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat

Terdapat banyak potensi pariwisata di Kabupaten Tebo, diantaranya adalah Danau Sigombak yang terletak di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu. Potensi lain adalah kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menjanjikan wisata petualangan yang bernuansa *off road* dan susur sungai yang menjanjikan keindahan yang eksotis alami Kabupaten Tebo.

Adapun untuk perekonomian Kabupaten Tebo Bersumber Pada perkebunan Sawit, Karet di dukung Oleh pertambangan baik itu Batu Bara, Minyak Bumi dan Tambang emas tapi masih dalam skala kecil. daerah ini kaya akan sumber daya alam dan bisa di jadikan daerah perikanan tawar karena diLewati oleh sungai terbesar di Provinsi Jambi yaitu Sungai Batanghari serta merupakan daerah rawa dataran rendah.Kabupaten Tebo Memiliki penduduk sejumlah  $\pm 335.228$  jiwa dengan 75 % adalah petani. Memiliki 1 Buah Pusat Kesehatan yaitu Rumah sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syariffudin, dibantu oleh 12 Pusat kesehatan Masyarakat (PKM) di 12 kecamatannya.

#### **4. Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten yang berada dibagian paling timur Provinsi Jambi, luas wilayahnya  $5.443 \text{ km}^2$  atau 10,86% dari luas provinsi Jambi, dengan populasi 232.048 jiwa dengan kepadatan  $43/\text{km}^2$ . Ibu kotanya ialah Muara Sabak. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan, 20

kelurahan yang terbagi lagi menjadi 73 desa. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berada ditepi pantai dan berbatasan dengan provinsi kepulauan Riau tepatnya di kabupaten Lingga dan juga Provinsi Sumatra selatan, tepatnya dikabupaten bnyasin.

Berikut batas Wilaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

- Sebelah Utara : Selat Berhala
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Banyuasi
- Sebelah Barat : kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi

## **5. Kota Sungai Penuh**

Salah satu kota di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang yaitu pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009.

Kota Sungaipenuh memiliki luas semuanya 39.150 ha, 59,2 % atau 23.177,6 ha yaitu kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru yaitu kawasan efektif perkotaan. Penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2020 berjumlah 97.190 jiwa dengan kepadatan 248/km<sup>2</sup>, secara administratif terdiri dari 8 kecamatan, 4 desa dan 65 desa. berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Barat, tepatnya kabupaten Pesisir Selatan.

Batas wilayah Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Depati Tujuh
- Sebelah Timur : Air Hangat Timur, Danau Kerinci Barat, Sitinjau Laut dan tanah cagak
- Sebelah Barat : Basa Ampek Balai Tapan, Sumatra Barat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Menganalisis data panel dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu metode *Common Effect Model* (CEM), metode *Fixed Effect Model* (FEM), metode *Random Effect Model* (REM). Dari hasil pengolahan Eviews 8 mendapatkan hasil sebagai berikut :

##### 1. Estimasi Model Data Panel

**Tabel 4.1**  
**Hasil *Common Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.153463	0.559162	0.274452	0.7859
X2?	0.376047	0.151810	2.477084	0.0201
X3?	0.111553	0.061008	1.828484	0.0790
C	28806.58	63827.78	0.451317	0.6555
R-squared	0.405215	Mean dependent var		257068.6
Adjusted R-squared	0.336586	S.D. dependent var		66203.00
S.E. of regression	53922.48	Akaike info criterion		24.75205
Sum squared resid	7.56E+10	Schwarz criterion		24.93887
Log likelihood	-367.2807	Hannan-Quinn criter.		24.81182
F-statistic	5.904433	Durbin-Watson stat		2.038285
Prob(F-statistic)	0.003261			

*Sumber : Eviews 8*

Dengan menggunakan *Common Effect* model terlihat bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap belanja modal. Sedangkan untuk dana alokasi umum (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal, dan untuk dana bagi hasil (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,336586 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independent (X1, X2, X3) terhadap

variabel dependent (Y) sebesar 33,6% sedangkan 66,4% dipengaruhi variabel lain selain variabel X1, X2, dan X3.

**Tabel 4.2**  
**Hasil *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	-0.325509	0.810773	-0.401480	0.6919
X2?	0.256649	0.170245	1.507523	0.1459
X3?	0.025927	0.065997	0.392847	0.6982
C	136729.5	101054.9	1.353022	0.1898
Fixed Effects (Cross)				
_MUARO_JAMBI—C	31687.12			
_SAROLANGUN—C	17932.76			
_TEBO—C	-30605.35			
_TANJUNG_JABUNG_				
TIMUR—C	36788.60			
_KOTA_SUNGAI_PEN				
UH—C	-55803.13			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.579768	Mean dependent var	257068.6	
Adjusted R-squared	0.446058	S.D. dependent var	66203.00	
S.E. of regression	49273.10	Akaike info criterion	24.67132	
Sum squared resid	5.34E+10	Schwarz criterion	25.04498	
Log likelihood	-362.0698	Hannan-Quinn criter.	24.79086	
F-statistic	4.336005	Durbin-Watson stat	2.701432	
Prob(F-statistic)	0.003743			

**Sumber : Eviews 8**

Berdasarkan hasil model *Fixed Effect* diatas terlihat bahwa pendapatan asli daerah (X1) tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Nilai *adjusted R-Squared* sebesar 0,446058 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independent (X1, X2 dan X3) terhadap variabel

dependent sebesar 44,6% sedangkan 55,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X1, X2 dan X3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Model *Random Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.111114	0.572109	0.194218	0.8475
X2?	0.351779	0.147277	2.388553	0.0245
X3?	0.079139	0.059798	1.323438	0.1972
C	49283.30	67465.40	0.730497	0.4716
Random Effects (Cross)				
_MUARO_JAMBI--C	8476.079			
_SAROLANGUN--C	2373.568			
_TEBO—C	-15275.40			
_TANJUNG_JABUNG_				
TIMUR—C	16284.40			
_KOTA_SUNGAI_PEN				
UH—C	-11858.64			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			18733.70	0.1263
Idiosyncratic random			49273.10	0.8737
Weighted Statistics				
R-squared	0.295949	Mean dependent var	188122.1	
Adjusted R-squared	0.214713	S.D. dependent var	57506.85	
S.E. of regression	50960.52	Sum squared resid	6.75E+10	
F-statistic	3.643052	Durbin-Watson stat	2.188930	
Prob(F-statistic)	0.025661			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.395930	Mean dependent var	257068.6	
Sum squared resid	7.68E+10	Durbin-Watson stat	1.925009	

**Sumber : Eviews 8**

Berdasarkan hasil model *Random Effect* diatas terlihat bahwa Pendapatan asli daerah tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,2147 yang

menunjukkan bahwa pengaruh variabel independent (X1, X2, dan X3) terhadap variabel dependent (Y) sebesar 21,4% sedangkan 78,6% dipengaruhi variabel lain selain variabel X1, X2, dan X3.

## 2. Uji Kesesuaian Model

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.284547	(4,22)	0.0926
Cross-section Chi-square	10.421777	4	0.0339

*Sumber : Eviews 8*

Hasil uji *chow* diatas menunjukkan bahwa a nilai probabilitas F statistiknya sebesar  $0,0926 > 0,05$ , artinya  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak, maka model estimasi regresi data panel yang lebih baik digunakan adalah *Common Effect Model*. Maka akan dilakukan uji Hausman.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.811306	3	0.1861

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.325509	0.111114	0.330043	0.4472
X2?	0.256649	0.351779	0.007293	0.2653
X3?	0.025927	0.079139	0.000780	0.0567

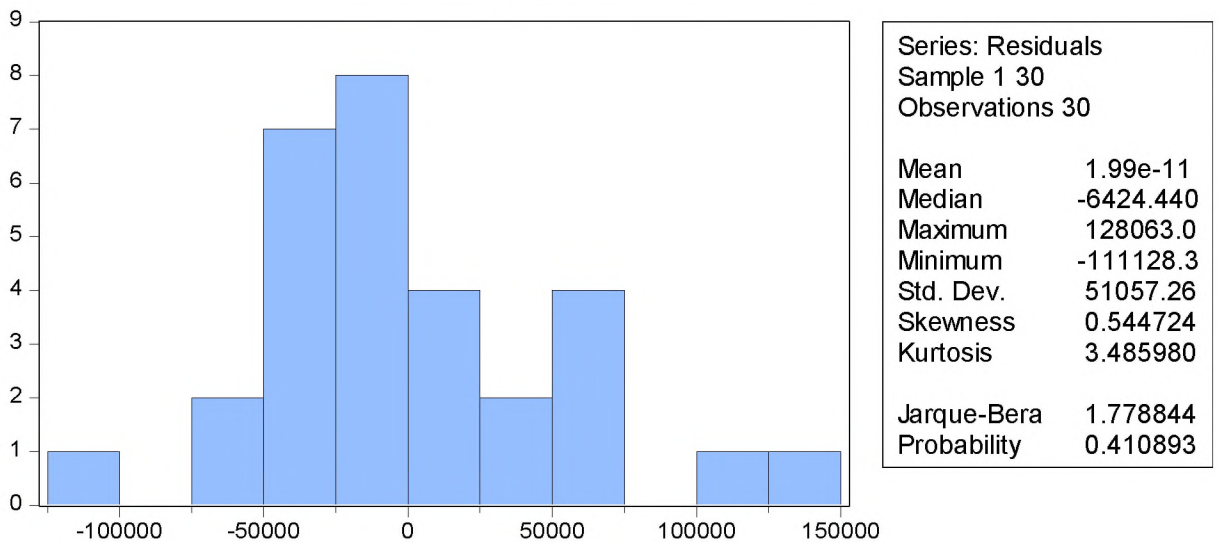
*Sumber : Eviews 8*

Hasil uji *Hausman* diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar  $0.1861 > 0.05$  artinya  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak, maka

estimasi model regresi data panel yang lebihh baik digunakan adalah *Random Effect Model*.

### 3. Uji Asumsi Klasik

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**



*Sumber : Eviews 8*

Hasil diatas menunjukkan nilai probabiility sebesar  $0,410893 > \alpha = 0,05$  yang artinya data terdistribusi normal.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji multikolonialitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.312662	15.65401	1.748084
X2	0.023046	70.51935	1.778436
X3	0.003722	1.837017	1.047261
C	4.07E+09	42.03403	NA

*Sumber : Eviews 8*

Hasil diatas menunjukkan koefisien korelasi antar variabel bebas X1 sebesar  $0,312662 < 0,90$  , variabel X2 sebesar  $0,641857 < 0,90$  dan variabel X3 Sebesar  $-0,037923 < 0,90$  yang artinya penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	0.919729	Prob. F(3,26)	0.4451
Obs*R-squared	2.878233	Prob. Chi-Square(3)	0.4108
Scaled explained SS	3.479872	Prob. Chi-Square(3)	0.3234

*Sumber : Eviews 8*

Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan probability Obs\* R-Squared  $0,4108 > 0,05$  yang artinya model regresi Random Effect Model tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.735460	Prob. F(2,24)	0.4898
Obs*R-squared	1.732469	Prob. Chi-Square(2)	0.4205

*Sumber : Eviews 8*

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan probability Obs\* R-Squared sebesar  $0,4205 > 0,05$  sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

#### 4. Regresi Data Panel

Setelah dilakukan estimasi model data panel, uji kesesuaian model, dan uji asumsi klasik, berikut adalah penjelasan persamaan regresi data panel pada penelitian dari :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Regresi dengan *Random Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.111114	0.572109	0.194218	0.8475
X2?	0.351779	0.147277	2.388553	0.0245
X3?	0.079139	0.059798	1.323438	0.1972
C	49283.30	67465.40	0.730497	0.4716
Random Effects (Cross)				
_MUARO_JAMBI—C	8476.079			
_SAROLANGUN—C	2373.568			
_TEBO—C	-15275.40			
_TANJUNG_JABUNG_				
TIMUR—C	16284.40			
_KOTA_SUNGAI_PEN				
UH—C	-11858.64			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			18733.70	0.1263
Idiosyncratic random			49273.10	0.8737
Weighted Statistics				
R-squared	0.295949	Mean dependent var		188122.1
Adjusted R-squared	0.214713	S.D. dependent var		57506.85
S.E. of regression	50960.52	Sum squared resid		6.75E+10
F-statistic	3.643052	Durbin-Watson stat		2.188930
Prob(F-statistic)	0.025661			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.395930	Mean dependent var		257068.6
Sum squared resid	7.68E+10	Durbin-Watson stat		1.925009

*Sumber : Eviews 8*

Dari hasil regresi diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it}$$

$$Y_{it} = 49283,30 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,08X3$$

Model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 49283,30 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) bernilai nol (0), maka variabel dependen (Y) yaitu Belanja Modal sebesar 49283,30.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) bernilai positif sebesar 0,11 artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,11.
- Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X2) bernilai positif sebesar 0,35 artinya apabila variabel Dana Alokasi Umum (X2) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,35.
- Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (X3) bernilai positif sebesar 0,08 artinya apabila variabel Dana Bagi Hasil (X3) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap



konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,08.

Berikut adalah persamaan regresi untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan model Random Effect:

1. Persamaan regresi Kabupaten Muaro Jambi

$$Y_{it} = 8476,079 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3$$

Nilai konstanta sebesar 8476,079 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 8476,079.

2. Persamaan regresi Kabupaten Sarolangun

$$Y_{it} = 2373,568 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3$$

Nilai konstanta 2373,568 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 2373,568.

3. Persamaan regresi Kabupaten Tebo

$$Y_{it} = -15275,40 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3$$

Nilai konstanta -15275,40 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mengalami penurunan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan

variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar -15275,40.

4. Persamaan regresi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

$$Y_{it} = 16284,40 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3$$

Nilai konstanta 16284,40 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 16284,40.

5. Persamaan regresi Kota Sungai Penuh

$$Y_{it} = -11858,64 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3$$

Nilai konstanta -11858,64 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mengalami penurunan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Belanja Modal akan mengalami penurunana sebesar -11858,64.

#### 4.1.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) dan Koefisien Korelasi (R)

Dari tabel 4.10 Dapat disimpulkan bahwa nilai *adjuster R<sup>2</sup>* pada penelitian ini sebesar 0,2147 atau 21,47%. Hal ini berarti bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 21,47% atau dengan kata lain kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat mencapai 21,47% sedangkan 78,53% merupakan kontribusi variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.1.2 Uji F (Simultan)

Dari hasil tabel 4.10 Uji hipotesis simultan (uji F) didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3,643 lebih besar dari  $F_{tabel}$  2,96 sehingga terdapat pengaruh, dengan demikian maka secara simultan variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2) dan dana bagi hasil (X3) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

#### 4.1.3 Uji T (Parsial)

Dari tabel 4.10 hasil pengujian secara parsial yang dapat dilihat pada tabel dan output diatas dengan nilai  $T_{tabel}$  2,408 jika  $T_{hitung}$  lebih besar dari T tabel maka berpengaruh. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dilihat dari T hitung sebesar 0,19 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,847 yang artinya probabilitas  $>$  tingkat  $\alpha$  (0,05).
2. Secara parsial variabel dana alokasi umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari T hitung 2,39 dengan tingkat probabilitas (X2) yang bernilai 0,024 atau lebih kecil dari pada tingkat  $\alpha$  (0,05).
3. Secara parsial variabel dana bagi hasil (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari T hitung sebesar 1,32 dengan tingkat probabilitas (X3) yang bernilai 0,1972 atau lebih besar dari pada tingkat  $\alpha$  (0,05).

## **4.2 Analisis dan Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan olah data model *Random Effect* pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Uumum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pra sarana terhadap masyarakat. Dana Alokasi Umum juga dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin:2010). Untuk meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan yang dimana akan menjadi suatu bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

### **4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan olah data model *Random Effect* pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Belanja Modal (Y). Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pra sarana terhadap

masyarakat. Yang dimana belanja modal akan melihat sisi kemandirian suatu daerah dari hasil pendapatan daerahnya itu sendiri, jika daerah mampu untuk memenuhi kegiatannya, maka daerah itu dikatakan makmur dan sejahtera.

#### **4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan olah data model *Random Effect* pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum mempunyai berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal (Y). Yang dimana dana alokasi umum merupakan suatu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dari APBN yang ditujukan untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dikarenakan pendapatan asli daerah belum memumpuni kegiatan pembangunan daerahnya. Dana Alokasi Umum juga dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin:2010).

#### **4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan olah data model *Random Effect* pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara parsial dana bagi hasil (X2) mempunyai berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Belanja Modal (Y). Dana Bagi Hasil yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan yang dimana akan menjadi suatu bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

### **4.3 Implikasi Kebijakan**

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri, yang dimana pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan hak untuk mengelola potensinya sendiri. Yang dimana Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan pengeluaran belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pra sarana masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi untuk menjadi daerah yang mandiri. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang masih lemah, namun harus diimbangi dengan pengembangan potensi daerah yang dikelola oleh masyarakat daerah itu sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian estimasi data panel maka model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*, dan berdasarkan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan :

1. Dilihat secara Uji f (Simultan) dapat kita simpulkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y).
2. Dilihat secara Uji t (Parsial) dapat kita simpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Bagi Hasil (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi perekonomian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, karena dengan menggali potensi ekonomi akan membuat Provinsi Jambi menjadi daerah yang mandiri dalam keuangan.

### 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Provinsi Jambi akan terus mengelola dan mengembangkan daerah nya sendiri untuk menjadi daerah yang mandiri dan menyejahterakan masyarakatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. INDEKS kelompok Gramedia.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar* 26-28 Juli 2007.
- Dodik, Siswanto dan Kusnandar. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Univ Indonesia. Jurnal Ekonomi.
- Farel, Rully. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor*. Jurnal Ekonomi. Volume 4 nomor 2.
- Febriana, Sherli Imas. Sugeng Praptoyo. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 4 Nomor 9.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal*.
- Nugroho, Totok. 2017. *Analisi Data Panel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia*. STIE. Atma Bhakti Surakarta. Jurnal

Pemendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Pradita, Ratna Rizanda. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur*.

Rifai, A. Rachmawati. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7.

Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupate/Kota Di Wilayah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sholikhah, dkk. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang Indonesia. Jurnal

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengelolaan Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765.

Website Kementerian Keuangan tahun 2020

Zahari. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal*, Universitas Batanghari. Jurnal Ilmiah. Volume 18 nomor 3 Tahun 2018.

Zais, Gogo. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Tridinanti Palembang. Jurnal

**Lampiran 1**  
*Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.153463	0.559162	0.274452	0.7859
X2?	0.376047	0.151810	2.477084	0.0201
X3?	0.111553	0.061008	1.828484	0.0790
C	28806.58	63827.78	0.451317	0.6555
R-squared	0.405215	Mean dependent var		257068.6
Adjusted R-squared	0.336586	S.D. dependent var		66203.00
S.E. of regression	53922.48	Akaike info criterion		24.75205
Sum squared resid	7.56E+10	Schwarz criterion		24.93887
Log likelihood	-367.2807	Hannan-Quinn criter.		24.81182
F-statistic	5.904433	Durbin-Watson stat		2.038285
Prob(F-statistic)	0.003261			

## Lampiran 2

### *Hasil Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	-0.325509	0.810773	-0.401480	0.6919
X2?	0.256649	0.170245	1.507523	0.1459
X3?	0.025927	0.065997	0.392847	0.6982
C	136729.5	101054.9	1.353022	0.1898
<b>Fixed Effects</b>				
<b>(Cross)</b>				
_MUARO_JAMBI-- C	31687.12			
_SAROLANGUN-- C	17932.76			
_TEBO--C	-30605.35			
_TANJUNG_JABU NG_TIMUR--C	36788.60			
_KOTA_SUNGAI_ PENUH--C	-55803.13			
<b>Effects Specification</b>				
<b>Cross-section fixed (dummy variables)</b>				
R-squared	0.579768	Mean dependent var	257068.6	
Adjusted R-squared	0.446058	S.D. dependent var	66203.00	
S.E. of regression	49273.10	Akaike info criterion	24.67132	
Sum squared resid	5.34E+10	Schwarz criterion	25.04498	
Log likelihood	-362.0698	Hannan-Quinn criter.	24.79086	
F-statistic	4.336005	Durbin-Watson stat	2.701432	
Prob(F-statistic)	0.003743			

### Lampiran 3

#### *Hasil Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.111114	0.572109	0.194218	0.8475
X2?	0.351779	0.147277	2.388553	0.0245
X3?	0.079139	0.059798	1.323438	0.1972
C	49283.30	67465.40	0.730497	0.4716
Random Effects (Cross)				
_MUARO_JAMBI-- C	8476.079			
_SAROLANGUN-- C	2373.568			
_TEBO--C	-15275.40			
_TANJUNG_JABU NG_TIMUR--C	16284.40			
_KOTA_SUNGAI_ PENUH--C	-11858.64			
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		18733.70	0.1263	
Idiosyncratic random		49273.10	0.8737	
Weighted Statistics				
R-squared	0.295949	Mean dependent var	188122.1	
Adjusted R-squared	0.214713	S.D. dependent var	57506.85	
S.E. of regression	50960.52	Sum squared resid	6.75E+10	
F-statistic	3.643052	Durbin-Watson stat	2.188930	
Prob(F-statistic)	0.025661			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.395930	Mean dependent var	257068.6	
Sum squared resid	7.68E+10	Durbin-Watson stat	1.925009	

## Lampiran 4

### Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.284547	(4,22)	0.0926
Cross-section Chi-square	10.421777	4	0.0339

### Hasil Uji Hausman

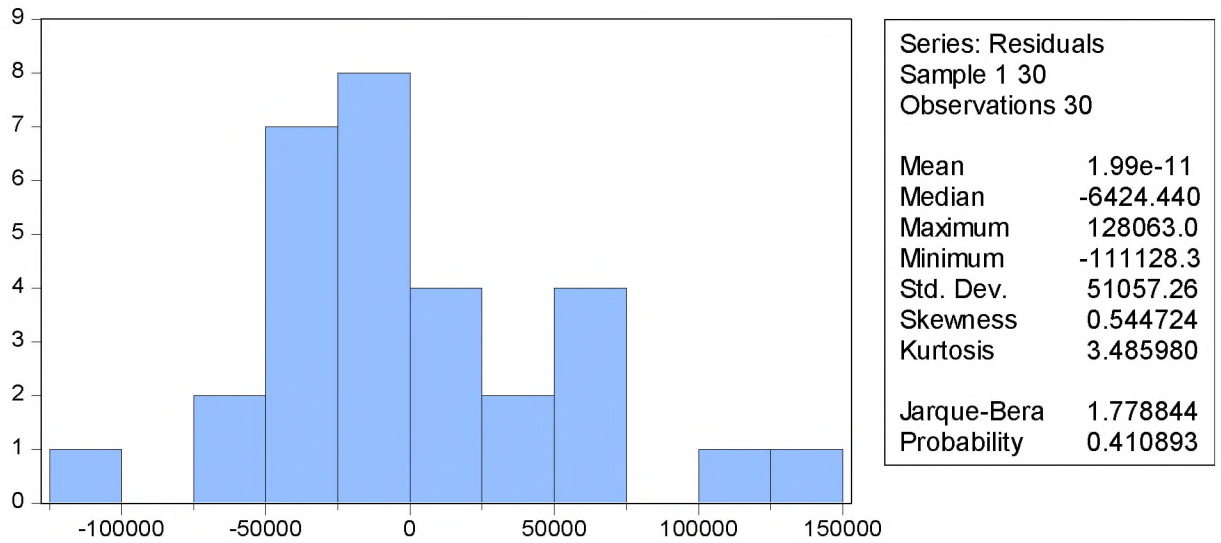
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.811306	3	0.1861

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.325509	0.111114	0.330043	0.4472
X2?	0.256649	0.351779	0.007293	0.2653
X3?	0.025927	0.079139	0.000780	0.0567

## Lampiran 5

### Uji Normalitas



### Uji Multikolonialitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.312662	15.65401	1.748084
X2	0.023046	70.51935	1.778436
X3	0.003722	1.837017	1.047261
C	4.07E+09	42.03403	NA

### Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.919729	Prob. F(3,26)	0.4451
Obs*R-squared	2.878233	Prob. Chi-Square(3)	0.4108
Scaled explained SS	3.479872	Prob. Chi-Square(3)	0.3234

F-statistic	0.735460	Prob. F(2,24)	0.4898
Obs*R-squared	1.732469	Prob. Chi-Square(2)	0.4205